

EXECUTIVE SUMMARY

**Seminar Nasional XXIII
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
“MASALAH KEPEMIMPINAN, DEMOKRATISASI
DAN KEBANGSAAN DI INDONESIA”
Makassar, 11 – 12 November 2008**

Latar Belakang

Setelah menapaki satu dekade perjalanan reformasi, kita boleh bersyukur bahwa kini rakyat sudah dapat berpartisipasi secara optimal dalam bidang politik untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen, kepala-kepala dan wakil kepala daerah, dan bahkan presiden serta wakil presiden melalui pemilu langsung. Namun kita juga masih harus prihatin melihat konflik-konflik lokal yang menghambat program-program pembangunan di daerah, yang ironisnya berlangsung bersamaan dengan merosotnya kualitas kepemimpinan di satu pihak, dan menguatnya kembali ikatan-ikatan primordial di pihak lain.

Oleh karenanya tidak mengherankan kalau perjalanan demokratisasi di Indonesia masih sering dipandang belum efektif dan cenderung prosedural, sehingga dinilai belum mampu membentuk pemimpin yang akuntabel, berjiwa nasionalis dan memahami penderitaan rakyat. Rakyat masih harus menanti-nantikan hadirnya sosok pemimpin yang visioner: memiliki visi kebangsaan dan kerakyatan, yakni pemimpin yang tidak hanya memiliki intelektualitas, integritas, dan jujur, melainkan juga berpihak terhadap kepentingan rakyat, serta cita-cita bangsa dan negara. Pemimpin-pemimpin yang seperti inilah yang diyakini akan mampu menghasilkan kemandirian bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompetitif.

Seharusnya praktik demokrasi tegas-tegas memberi porsi yang lebih besar bagi terwujudnya kedaulatan rakyat. Sayangnya kedaulatan rakyat selama ini terkesan masih diberikan sebatas pada saat rakyat menggunakan hak suara dan memberikan pilihannya pada kotak-kotak suara Pemilu. Akibatnya dalam banyak hal rakyat masih harus menerima nasibnya dipimpin oleh orang-orang yang lebih berorientasi kepada kepentingan pribadi, kelompok, elit ataupun golongan yang hanya menghasilkan kesengsaraan dan menambah kesulitan hidup rakyat yang berkepanjangan. Tidak jarang rakyat harus kecewa menyaksikan perilaku sebagian pemimpin yang justru kurang berempati pada penderitaan rakyat karena hanya memikirkan fasilitas pribadi daripada fasilitas publik.

Sejatinya sebuah momen Pemilu Legislatif dan Presiden yang merupakan salah satu unsur pokok dan mendasar dalam sistem politik demokratis ditujukan terutama untuk mencari dan mendapatkan figur-figur pemimpin nasional masa depan yang kredibel dengan program-program kerja konkrit guna mewujudkan kehidupan politik bangsa yang semakin maju. Oleh karenanya Pemilu Legislatif dan Presiden 2009 mendatang oleh banyak kalangan dapat dipandang sebagai momentum untuk menilai sejauh mana legitimasi reformasi melalui pemantapan demokrasi mampu menghasilkan perbaikan kehidupan, menghadirkan rasa aman dan keadilan serta prinsip keterwakilan seluruh elemen bangsa.

Dengan demikian sistem politik demokratis yang dibangun pasca Orde Baru seharusnya mampu membangun solidaritas bangsa bukan justru sebaliknya. Oleh karena itu produknya pun harus mampu melahirkan elit pemimpin-pemimpin tingkat nasional

maupun lokal yang visioner, berkarakter dan membanggakan. Negara dan bangsa Indonesia harus mampu membangun kepemimpinan yang kuat dan kredibel tidak hanya pada sisi kelembagaan eksekutif, melainkan juga pada sisi kelembagaan legislatif dan bahkan yudikatif. Bagaimana mungkin rakyat akan mendukung program-program pemerintah kalau pemerintahnya sendiri terlihat kurang menunjukkan keberpihakannya kepada nasib dan kepentingan bangsanya? Bagaimana mungkin rakyat merasa nyaman bila dipimpin oleh orang-orang yang ternyata lebih loyal kepada kepentingan asing daripada bangsanya sendiri?

Membangun sistem politik demokrasi tidak berarti bahwa kita harus tercerabut dari akar budaya nasional kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oleh karenanya model kepemimpinan nasional manapun yang akan dipilih dan dilaksanakan, semuanya itu hendaknya ditujukan untuk memperkuat demokratisasi dan paham kebangsaan kita sendiri. Demokrasi adalah sebuah sistem bukan tanpa kelemahan, namun inilah pilihan terbaik kita saat ini yang harus diyakini akan mampu menghasilkan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.

Pelaksanaan dan Bentuk Kegiatan

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulsel, bermaksud menyelenggarakan Seminar Nasional XXIII bertema “Masalah Kepemimpinan, Demokratisasi dan Kebangsaan di Indonesia”.

Tujuan

1. Membahas, mendiskusikan dan merumuskan model kepemimpinan politik dalam memperkuat demokratisasi dan kebangsaan.
2. Menghasilkan rekomendasi tentang model kepemimpinan politik dalam memperkuat demokratisasi dan kebangsaan.
3. Menyebarkan hasil-hasil dan rekomendasi Seminar Nasional AIPI ke masyarakat, partai-partai politik, parlemen nasional dan daerah, dan pemerintah.

Topik-Topik Utama

1. Kepemimpinan nasional dalam demokratisasi di Indonesia pasca-Soeharto
2. Kepemimpinan lokal era Pilkada Langsung
3. Problematik kebangsaan era demokratisasi dan otonomi daerah
4. Tantangan kebangsaan dalam era globalisasi
5. Pemilu 2009, keterwakilan politik dan konsolidasi demokrasi
6. Kepemimpinan dan kebangsaan: Perspektif perbandingan

Makalah-Makalah dan Pembicara

Makalah-makalah dalam Seminar Nasional XXIII AIPI disajikan oleh para pakar politik dan pemerintahan, hubungan internasional dan administrasi negara, serta kalangan praktisi politik, baik yang diundang oleh panitia, maupun mereka yang berminat menyampaikan makalah yang sebelumnya diseleksi oleh PP AIPI.

Pelaksanaan Seminar

Seminar Nasional XXIII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) “Masalah Kepemimpinan, Demokratisasi dan Kebangsaan Di Indonesia” diadakan pada tanggal 11-12 November 2008 di Hotel Aryaduta – Makassar Sulawesi Selatan. Secara umum, pelaksanaan seminar berjalan lancar dan sukses. Dari kurang lebih 300 undangan yang

disebarkan, peserta yang hadir berjumlah lebih dari 250 orang. Adapun peserta yang hadir antara lain:

1. Peserta perwakilan dari Pengurus Cabang AIPI di berbagai daerah.
2. Peserta perwakilan dari Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten).
3. Peserta dari organisasi penyelenggara pemilu umum (KPU dan panwas) Propinsi Sulawesi Utara.
4. Peserta dari partai politik.
5. Peserta dari kalangan kademisi.
6. Peserta dari Lembaga Legislatif
7. Peserta dari kalangan mahasiswa
8. Perwakilan media cetak dan elektronik baik dari lokal maupun nasional.

Hari Pertama, 11 November 2008

Pada hari pertama tema makalah adalah “Masalah Kepemimpinan Nasional Pasca-Orde Baru”. Bahasan tema ini lebih dititik beratkan pada problematika kepemimpinan nasional serta strategi yang biasa dilakukan untuk mencetak kepemimpinan nasional yang ideal. Pembicara dalam sesi ini adalah Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA, Dr. Ninok Leksono serta Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, MA.

Berikut Intisari dari sesi pertama

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Meskipun dihasilkan melalui pemilu demokratis, kinerja pemerintahan menjadi tidak efektif karena seringkali harus berurusan dengan *deal-deal* politik: berbagi kekuasaan, berbagi posisi, dan juga berbagi rejeki. Itu sebabnya, setelah 10 tahun reformasi berjalan, muncul sinisme di kalangan mereka yang pragmatis: demokrasi di Indonesia tidak menghasilkan apa-apa. Khususnya karena kesejahteraan ekonomi yang diharapkan rakyat bukan saja tak kunjung terealisasi, melainkan semakin menjauh.

Dalam situasi demokrasi seperti itu, tidak aneh jika kemudian muncul kerinduan terhadap adanya “Kepemimpinan Nasional” yang ideal. Satu kepemimpinan yang diharapkan dapat menerabas kerewelan demokrasi prosedural. Pemimpin yang mampu memberi inspirasi, memotivasi dan berinovasi. Pemimpin nasional seperti itu harus memiliki dukungan politik kuat, mempunyai kompetensi (dalam hal kesadaran, wawasan, pengalaman, dan kapasitas), serta yang tak kalah penting: memiliki integritas. Hanya pemimpin berintegritas yang akan mampu mentransformasi sistem demokrasi yang saat ini bersifat transaksi menjadi substansi.

Di Indonesia, faktanya, politik adalah persoalan ego personal dan partai politik hanyalah kendaraan untuk meraih kekuasaan semata. Seorang politisi dapat berpindah partai, mendirikan partai baru, atau melakukan koalisi partai semata-mata untuk transaksi kekuasaan.

Untuk mendapatkan kepemimpinan nasional yang ideal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi; *Pertama*, melakukan seleksi kompetitif partai, antar partai dan di luar partai bahkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi serta iklan di media massa dan memperkuat kontrol sosial masyarakat (*civil society*) terhadap kepemimpinan yang akan muncul. Hal ini dapat dicapai dengan membangun pers yang kuat, sebagai *the fourth estate*, adalah salah satu cara lain untuk mewujudkannya; *Kedua*, menyeimbangkan kekuatan politik yang ada agar dapat melakukan mekanisme oposisi yang sehat sehingga dengan kultur akuntabilitas yang kuat dapat menekan siapapun yang terpilih sebagai pemimpin bertanggungjawab pada publik.

Dengan berjalannya dua faktor tersebut dengan baik, dengan sendirinya pemimpin yang terpilih harus menyesuaikan tindakannya dan menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan nasional seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia.

Dr. Ninok Leksono

Pemimpin bisa dicetak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin: Pertama, adanya *leadership*, Kedua mampu mengembangkan efektifnes, dalam satu proses pembuatan kebijakan (*decision making*), Ketiga memiliki kecakapan manajerial dan masalah kenegaraan. Konteksi munculnya seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan yang dikembangkannya. Bung Karno misalnya, yang muncul dan tumbuh pada masa pergerakan. Ciri kepemimpinannya pun sesuai dengan latar belakang itu: amat nasionalistik, populis. Ditambah dengan bakat orasinya, kepemimpinannya juga bersifat *emotive* (menggugah). Pada sisi lain, terlalu berat pada populisme menyebabkan kepemimpinan Bung Karno *out of touch* dengan problema nyata, antara lain mengakibatkan perekonomian kedodoran.

Soeharto berlatar-belakang birokrasi militer. Ia pun menampilkan karakter yang diharapkan dari latar belakang itu: tegas, memberi perhatian pada persoalan teknis. Pada sisi lain, kepemimpinan dari latar belakang ini menjadi terlalu *rigid*, kurang memberi keleluasaan.

BJ Habibie termasuk lama dalam kepemimpinan birokrasi, meskipun barangkali dia merupakan pemimpin yang membawa ciri birokrasi teknis bernuansa kuat CEO. Fokus yang terlalu besar terhadap masalah teknis, membuat Habibie hanya punya waktu sebentar untuk mengembangkan sisi kepemimpinan lain. Tetapi harus diakui, dalam kesebentaran waktu kepemimpinan, Habibie bisa dikatakan berhasil menunaikan misi pokok kepemimpinannya waktu itu, yaitu menstabilkan perekonomian yang sedang dilanda krisis.

Gus Dur merupakan pemimpin yang berangkat dari kepemimpinan organisasi kemasyarakatan (NU) dan memiliki daya intelektual dan kultural sangat kuat, yang sebenarnya merupakan aset besar yang berpotensi untuk menjadikan kepemimpinannya sukses.

Megawati Soekarnoputri juga berangkat dari pergerakan. Kalaupun ada catatan mungkin prosesnya masih kurang lama, sekitar 10 tahun, sehingga ia menapak ke jabatan eksekutif tertinggi Republik lebih dengan kharisma dan dukungan populis yang sebelumnya dalam posisi terdzalimi.

SBY boleh dikatakan pemimpin pasca Reformasi yang memenuhi persyaratan ideal: tumbuh dari birokrasi militer dan memiliki kemampuan intelektual sangat tinggi.

Ketika begitu banyak pekerjaan rumah terhampar di depan mata, ketika kondisi dunia sedang mengalami perubahan fundamental, jelas kepemimpinan di Indonesia harus berubah mengikuti dinamika problema yang ada. Tanpa perubahan, maka yang akan muncul adalah pemimpin gaya lama, yang sekadar memberi perintah, sementara pemimpin modern bekerja keras memberdayakan rakyat untuk mencapai cita-cita bersama.

Kepemimpinan sesungguhnya tengah mengalami revolusi yang sangat mendalam yang dipicu oleh munculnya perubahan dunia yang tidak saja gegap-gempita, tetapi juga khaotik. Pengabaian terhadap realita baru ini dipercayai bisa berakibat fatal bagi para pemimpin dan organisasi yang dipimpinnya.

Dalam perspektif itu, jelas tidak memadai bila seseorang ingin maju sebagai pemimpin – apalagi untuk bangsa sebesar Indonesia – hanya berbekal keinginan.

Leadership Model in the Making: Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, MA

Model kepemimpinan Indonesia dalam proses penjelmaan. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penjelmaan. Proses tersebut cenderung mengalami kemacetan karena pilihan-pilihan strategi yang salah. Sebagai contoh, pada saat ini, Indonesia di satu sisi menganut sistem presidensial, namun dalam implementasinya lebih banyak menerapkan sistem parlementer. Akibatnya sistem yang ada tidak jalan. Hal tersebut diperparah dengan fenomena munculnya presiden berasal dari partai kecil, yang mudah gampang digugat, serta adanya partai besar (Golkar) tetapi dia lumpuh. Selain itu, keadaan masyarakat Indonesia yang selalu ingin mempertentangan sesuatu dengan yang lainnya. Yang ingin selalu merasa curiga dengan sesuatu dengan yang lainnya, menjadikan kerumitan tersendiri dalam mencari pilihan strategi ke depan. Untuk itu, diperlukan upaya keras untuk mendorong perubahan, bagaimana pemimpin bisa mendorong perubahan-perubahan yang terjadi.

Sessi Kedua

Tema: Pilkada Langsung dan Kepemimpinan Lokal.

Sessi kedua lebih menyoroti dampak pemilihan daerah langsung terhadap terciptanya kepemimpinan lokal serta implikasi atas gaya kepemimpinan dan kebijakan yang dihasilkan. Pembicara pada sesi ini adalah: Dr. Syarif Hidayat dan Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.

Dr. Syarif Hidayat

Sistem Pilkada secara langsung menjanjikan sejumlah harapan. Namun, dibalik sejumlah harapan tersebut, juga terdapat sejumlah tantangan, dan/atau “bias” Pilkada. Diantara “bias” Pilkada yang dimaksud adalah, relatif sulitnya dihindari praktik *money politics* dan politik aliran ketika proses pemilihan pasangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah berlangsung. Tatkala proses Pilkada itu sendiri sangat sarat diwarnai oleh praktik “persekongkolan-persekongkolan” politik dan bisnis, maka tidak mengherankan jika kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca Pilkada, pasangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan lebih memberikan loyalitasnya kepada para klien politik dan klien bisnisnya daripada kepada masyarakat pemilih (konstituen).

Bila dilihat dari latar belakang karir yang dimiliki, para Gubernur yang terpilih dan memenangkan perolehan suara pada proses Pilkada adalah para kandidat yang berasal dari kalangan birokrat karir, atau para *mantan pejabat tinggi pemerintah daerah*. Kemenangan dari para kandidat Gubernur yang berstatus “mantan pejabat pemerintah” tersebut, tentunya, sangat terkait erat dengan “modal politik” dan “modal ekonomi (*finansial*)” yang mereka miliki. Kemenangan dari masing-masing kandidat, pada akhirnya, sangat ditentukan oleh kekuatan dari dua modal utama itu. Kandidat yang berstatus “mantan pejabat tinggi pemerintah”, tidak diragukan, telah memiliki modal politik (utamanya jalur birokrasi) dan modal *finansial* yang cukup kuat, melalui mana proses akumulasi dari dua modal tersebut dilakukan, ketika si-kandidat menduduki jabatan.

Kedua, adanya kecenderungan “pecah kongsi” antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. *Ketiga*, karakteristik dari relasi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah cenderung terkonsentrasi ditangan sekelompok elit, atau apa yang disebut dengan “oligarkhi kekuasaan”. Basis dari “konstruksi” oligarkhi kekuasaan ini, relatif bervariasi, diantaranya adalah belandaskan pada: kekuatan partai politik, ikatan kekerabatan, ikatan kesukuan dan hubungan keluarga.

Keempat, praktik oligarkhi kekuasaan tersebut relatif dapat berjalan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena ditopang oleh keberadaan “pemangku otoritas informal”, yang berperan sebagai “aktor penghubung” (*connected*

actor) antara para pejabat pemerintahan daerah dengan masyarakat, pada umumnya, dan dengan para pengusaha pada khususnya. Pemangku otoritas informal inilah, dalam banyak hal, bertindak sebagai *shadow political and business manager* dari para pejabat pemerintahan daerah, dimana mereka memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Para “aktor” yang berperan sebagai *shadow political and business manager* tersebut, umumnya adalah “orang-orang dekat” Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, dan mantan Tim Sukses ketika Pilkada berlangsung. Latar belakang profesi mereka pun cukup variatif, satu diantaranya yang paling dominan adalah dari kalangan pengusaha, atau apa yang telah dilabeli oleh Mills (1956) sebagai *corporate rich*.

Dalam kurun waktu 10 Tahun pertama reformasi yang berlangsung di tanah air sejauh ini, sejatinya baru berhasil dalam hal menggeser moda oligarkhi kekuasaan pada tubuh negara, dari *personalised government* (mono-polar oligarkhi) ke multi-polar oligarkhi. Atau dengan kata lain, belum pada konteks pergeseran dari otoritarian menuju “demokrasi”. Sementara pada sisi *society*, telah melahirkan *societal actors* (elit masyarakat) sebagai “pemain” baru dalam ranah politik. Elit masyarakat ini, merupakan kelompok yang paling diuntungkan dari proses “reformasi”, karena mereka yang paling siap memaksimalkan kesempatan partisipasi, akibat dari lemahnya posisi tawar, atau bahkan belum siapnya masyarakat sivil (*civil society*). Oleh karenanya, tidak mengherankan bila, antara lain, hasil penelitian di dua provinsi, sebagaimana dikemukakan di atas, memperlihatkan bahwa praktik Pilkada langsung yang secara konseptual di rancang untuk menebar “benih demokrasi” di tingkat lokal, justru telah “menuai” praktik oligarkhi.

Upaya untuk memperbaiki dan memperkokoh institusi negara (*state institutional reforms*) memang harus dilakukan. Namun demikian, bila hal ini tidak disertai dengan upaya membangun kapasitas negara (*state capacity*), maka akan berimplikasi pada semakin tidak kentarnya “aktualitas negara” (*state in practice*) dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu, cukup beralasan bila disarankan agar ke depan, proses “reformasi” harus lebih ditekankan pada upaya membangun kapasitas negara (*state capacity*). Untuk itu, maka fokus reformasi seyogianya harus lebih ditekankan pada upaya membangun dan memperkuat empat pilar utama dari *state capacity* meliputi: Kapasitas Institusional (*Institutional Capacity*); Kapasitas Teknis (*Technical Capacity*); Kapasitas Administratif (*Administrative Capacity*); dan Kapasitas Politik (*Political Capacity*). Upaya membangun kapasitas negara ini, tentunya, juga harus disertai dengan upaya membangun kapasitas masyarakat *civil* (*societal capacity*).

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

Sebagai produk Pilkada, kualitas kepemimpinan Gubernur, Bupati dan Walikota dipengaruhi oleh pola rekrutmen serta transaksi politik yang dilakukannya. Proses pemilihan kepemimpinan daerah melalui pilkada langsung saat ini cenderung bersifat monopolistik, sentralistik dengan biaya transaksi yang tinggi. Akibatnya para kandidat dibebani biaya tinggi, yang akhirnya mendorong munculnya calon-calon karbitan yang di dukung oleh faktor uang semata. Pola rekrutmen yang demikian itu akan membendung munculnya calon pimpinan daerah yang memiliki kualitas kepemimpinan yang paripurna efektif, *transformative* dan *visioner*. Terbukanya ruang tampilnya kandidat Gubernur atau Bupati/Walikota dari calon independen dan rekomendasi partai atas calon yang ditetapkan melalui mekanisme yang terdesentralisasi, merupakan solusi alternatif mengatasi *market failures*.

Sessi Ketiga

Tema: Problematik Kebangsaan Era Demokratisasi dan Otonomi Daerah

Sesi ini secara khusus membahas tentang persoalan problematika kebangsaan serta kaitannya dengan masalah kepemimpinan nasional. Sesi ini juga membahas upaya-upaya yang biasa dilakukan untuk mengatasi problematika kebangsaan baik dari aspek politik maupun regulasinya, sehingga di masa mendatang bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Berbicara dalam sesi ini Prof. Dr. Mochtar Pabottingi, Dr. Ir. Sudarsono H, MA, SH dan Achmad Herman, S.Sos, M.Si

Prof. Dr. Mochtar Pabottingi

Hampir semua fase-fase demokrasi mengalami distorsi. Pemilihan umum, parpol legislatif, yudikatif, eksekutif mengalami distorsi. Terutama distorsinya pada merajalelanya politik uang dan tiadanya pengindahan pada *nation*. Salah satu contoh hal ini diperlihatkan, bagaimana undang-undang bisa dibuat untuk kepentingan konglomerasi, dan bukan untuk kepentingan bangsa kita. Pada eksekutif banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan *nation* kita.

Indonesia termasuk di dalam bangsa yang *nation*-nya istimewa. *Nation* Indonesia, *nation* lintas suku, *nation* yang lintas ras, lintas agama, lintas ideologi, bahkan lintas bahasa, itu tidak banyak yang demikian di dunia. Itu sangat istimewa, dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. *Nation* memiliki kaitan erat dengan demokrasi yang erat. Pada *nation* ada prinsip-prinsip solidaritas, kesetaraan, kesaling percaya keadaban. Pada demokrasi ada prinsip-prinsip keadilan, kemerdekaan, rasionalitas politik dan supremasi hukum. Hanya dengan wadah *nation*, demokrasi bisa tumbuh secara sehat. Sebaliknya, hanya dengan demokrasi serat-serat *nation* makin kuat.

Demokratisasi di Indonesia telah dilancarkan tanpa kesiapan dan koordinasi yang baik pada barisan reformasi disertai motif-motif politik buruk pada personalia. Orde Baru yang hanya minus Soeharto dan praktis tetap utuh. Tiadanya kesiapan di kalangan barisan reformasi pada gilirannya merupakan akibat dari (1) kegentingan atau kedaruratan situasi politik pada umumnya; (2) tiadanya pergantian rezim yang bersih lantaran moda transisi ketiga tadi, yang pada gilirannya mengakibatkan kekisruhan politik, dan dipertahankannya dengan sengaja asumsi yang salah yang mendasari upaya-upaya reformasi; (3) diingkari atau ditolaknya paradigma transisi; (4) kelicikan apa yang disebut “rekonsiliasi nasional,” (5) merajalelanya korupsi dan penjual-murahan aset-aset dan sumber-sumberdaya nasional yang dibiarkan tanpa hukuman; (6) kegagalan bertolak dari prinsip-prinsip utama *nasion* dan *demokrasi*—dan simbiosis dari keduanya—lantaran miskinnya pemahaman tentang demokrasi di kalangan rakyat pada umumnya serta tiadanya kesadaran akan pentingnya pendidikan tentang demokrasi, baik dari barisan reformasi, apalagi dari pemerintah.

Langkah-langkah ke arah pembenahan bukan hanya pada KHN (Komisi Hukum Nasional), melainkan pada segenap cendekiawan politik dan hukum yang peduli. Potensi pemberantasan korupsi yang tampaknya berlanjut, akan bisa memotong praktek politik uang, yang boleh dikata paling banyak dalam proses karikaturisasi demokrasi tadi.

Dr. Ir. Sudarsono H, MA, SH.

Problematik kebangsaan kita umumnya bertumpu kepada empat pilar kebangsaan Empat pilar kebangsaan tersebut adalah Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Tentang Pancasila, problematik tersebut lebih dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan regulasi yang ada. Misalnya, Undang-Undang No. 20 tahun 2003, pasal 2 menegaskan, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Tetapi kemudian pada pasal 37 yang mengatur kurikulum wajib untuk pendidikan dasar

dan menengah, dan pendidikan tinggi, itu tidak disebutkan. Sedangkan pada UUD 45, problematik tersebut nampak dengan masih adanya anomali pasal-pasal hasil amandemen UUD 45, misalnya terkait dengan pasal 18 sudah menggelontorkan semua urusan itu menjadi desentralisasi luas kepada provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan mengenai persoalan NKRI, problematik yang muncul lebih banyak karena perbedaan interpretasi atas konsep NKRI. Sebagaimana kalangan menyatakan bahwa NKRI tidak dapat diubah, namun sebagian lagi menyatakan NKRI dapat didekonstruksi asalkan tidak mengubah bentuk negara republik. Adapun problematik dalam proses kebhinekaan yang banyak muncul adalah persoalan-persoalan yang menyangkut perlindungan HAM, perlindungan masyarakat oleh daerah, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antar etnis dan suku.

Persoalan berikutnya yang perlu dianalisis terkait dengan problem kebangsaan adalah tentang daya saing bangsa. Pasal 2 ayat 3 UU 32 sangat jelas, menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karenanya seharusnya daya saing menjadi pilar ke lima dalam menganalisis problem kebangsaan. Untuk sebab, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana ke depan membangun masyarakat berbasis pengetahuan. Sejauh mana kontribusi organisasi sosial, pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, pengembangan peralatan-peralatan, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada mampu menjawab tantangan daya saing global sekaligus mengatasi problematik kebangsaan.

Sessi Keempat

Tema: Tantangan Kebangsaan dalam Era Globalisasi

Sessi ini lebih memfokuskan pada aspek-aspek globalisasi dan dampaknya terhadap masalah-masalah kebangsaan baik dari aspek ekonomi maupun politik. Pembicara dalam sessi ini adalah; Prof. Dr. Amien Rais, Drs. Revrison Baswir, MBA, Dr. Riwanto Tirtosudarmo, serta Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA

Prof. Dr. Amien Rais

Fenomena globalisasi mencuatkan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan, yaitu adanya *the suchort corporation crazy*. Yang terdiri atas enam elemen; korporasi, perusahaan-perusahaan besar. Ada dukungan politik dari pemerintahan, dukungan militer, dukungan media massa, dukungan perbankan, dukungan intelektual. Keenam elemen tersebut akan berjalan dengan baik jika ada faktor ke tujuh yang paling penting yaitu elit yang menampung, yang membuka gerbang untuk penjajahan ekonomi itu.

Meskipun Indonesia sudah enam dasawarsa lebih meredeka, namun tetap terkukung dalam kemeralatan, tetap miskin, dan tidak punya masa depan cemerlang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor; *Pertama*, dalam zaman globalisasi ini, nampaknya Indonesia sudah cukup lama kehilangan *self confiden*, kehilangan rasa percaya diri. Kalau satu bangsa sudah kehilangan *self confiden*, secara otomatis akan kehilangan kedaulatan, kemandirian, kemerdekaan dan segala macam hal yang membuat sebuah bangsa dan negara itu berdiri teguh di atas kaki sendiri. Kehilangan kemandirian tersebut telah menyebabkan mental ketergantungan. Bergantung sama IMF, bank dunia.

Kedua, kita sebagai bangsa besar telah mengkhianati kontitusi kita, terutama mengingkari pasal 33 UUD 1945. Pengkhianatan tersebut adalah bahwa kita tidak membangun ekonomi kerakyatan. Tapi sejatinya sejak dulu sudah membangun sebuah ekonomi yang *the surcort market friendly economy, liberal economy, moral capitalis economy*. Dimana hal tersebut dilakukan secara sengaja, sistematis dan terus menerus.

Sehingga hasilnya adalah ekonomi yang berbasis konglomerasi, yang mengakibatkan adanya *widening gap* yang luar biasa.

Ketiga, sebagian besar masyarakat kita telah menderita penyakit mental *in lander* atau sudah kejangkitan penyakit *shourt cut mentality*. Mentalitas menerabas, ingin kaya tapi gak mau kerja. Ingin berhasil tapi malas dan sebagainya. Fenomena ini terlihat dari banyaknya korupsi yang melanda di hampir seluruh segmen masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk keluar dari tiga persoalan tersebut adalah: Pertama melakukan mental *recontruction*, supaya kita tidak bermental *in lander*, bermental bumi putra ala zaman kolonialis dulu. Tapi kita itu betul-betul punya mental yang superin, yang *free, independen, self confident*, sehingga menimbulkan sebuah bangsa yang berdikari, penuh kreatifitas; Kedua, kita ini sesungguhnya harus malu bahwa yang kita terapkan adalah ekonomi pasar, yang jelas-jelas membuat rakyat itu sudah mengalami proses kemiskinan. Untuk itu diperlukan kebijakan payung, yang mampu mengentigrasikan potensi SDA dan SDM. Misalnya dalam kaitannya dengan pengelolaan SDA, bahwa sumber daya alam kita terutama migas, itu boleh dibawa keluar setelah konsumsi domestik itu dipenuhi.

Drs. Revrisond Baswir, MBA

Indonesia memang sudah memproklamasikan diri selama 63 tahun sebagai bangsa yang merdeka, 63 tahun yang lalu sudah memproklamasikan diri. Tetapi persoalannya adalah apakah proklamasi itu sama dengan merdeka?. Dari sejarah kita semua tahu bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 itu tidak serta merta menyebabkan pihak kolonial mundur. Hal tersebut dikarenakan pihak kolonial yang kemudian melakukan transformasi, tidak sepenuhnya mengapresiasi bangsa Indonesia untuk merdeka. Pengakuan kedaulatan Indonesia 1949 itu disertai dengan syarat; Pertama, Indonesia harus mengikui jalan IMF. Kedua Indonesia harus bersedia menerima warisan hutang Hindia Belanda yang jumlahnya 6,3 miliar golden, meskipun dalam perkembangannya Indonesia sepakat untuk mewarisi hutang Hindia Belanda sekitar 4,3 milyar golden.

Sebenarnya sudah ada upaya dari bangsa Indonesia untuk menghindari ketergantungan pihak luar. Pada bulan Agustus 1965 misalnya, Indonesia melahirkan UU Pembatalan Modal Asing. Dimana dalam UU itu jelas-jelas dikatakan bahwa kehadiran modal asing di Indonesia hanya akan melestarikan neo kolonialisme, neoimperialisme, oleh karena itu maka harus segera diakhir. Namun demikian, seiring dengan lahirnya UU tersebut, Indonesia tiba-tiba mengalami gejolak politik yang sangat besar yang dikenal dengan peristiwa 30 September 1965.

Setelah peristiwa gerakan 30 September politik ekonomi Indonesia berubah drastis. Indonesia kembali menempuh jalur pro neoimperialisme yang ditandai dengan muncul beberapa kebijakan seperti UU No. 7 mendaftar jadi anggota Asian Development Bank, UU No. 8, november 66, sepakat mengangsur kembali hutang-hutang Hindia Belanda, UU No. 9, tahun 66, mendaftar kembali menjadi anggota IMF dan World Bank, dan klimaksnya terbit UU No. 1 tahun 1967, mengenai Penanaman Modal Asing.

Dari aspek ekonomi pembagian periodisasi pemerintahan berdasarkan Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi tidaklah tepat lagi. Periodisasi pemerintahan tersebut lebih tepat dikategorisasikan menjadi Bung Karno, itu adalah era revolusi yang belum selesai, era Soeharto itu adalah era *counter revolution*, kontra revolusioner, serta 32 era Soeharto ditandai dengan dominannya peranan para ekonom neoliberal, dengan simbol namanya mafia Berkley. Merekalah yang merumuskan agenda-agenda liberalisasi, penghapusan subsidi, termasuk terakhir-akhir kemudian mengundang IMF. Dengan periodisasi yang demikian, maka era reformasi saat ini sesungguhnya merupakan

penyempurnaan era neokolonialisme dan bukan kelanjutan dari revolusi yang belum selesai, atau kelanjutan dari kontra revolusioner. Pada kondisi yang semacam ini, maka sistem politik kita diacak-acak, politik, aktifitas-aktifitas politik dikomoditaskan. Akibatnya apa, jabatan-jabatan politik sekarang ini diperebutkan oleh orang-orang yang punya uang, kapital akhirnya yang lebih banyak menentukan. Aktornya boleh siapa-siapa, aktornya boleh intelektual, akademisi dan lain sebagainya. Tetapi karena pertarungan politik sangat tergantung kepada kapital, akhirnya kapital yang menentukan.

Dalam proses yang demikian maka semua akan di dorong masuk ke dalam wilayah *price mekanism*, semuanya akan ditentukan pakai harga. Bagi yang punya uang silahkan membeli dan yang tidak punya silahkan minggir. Kecuali menjelang pemilu anggaran di tingkat nasional ataupun daerah biasanya akan dipenuhi dengan belanja-belanja dukungan politik. Maka anggaran 2009 penuh dengan BLT, BOS, ini itu dan sebagainya. Di situ kemudian anggaran publik di pakai oleh kekuasaan untuk membeli dukungan politik. Dan dengan cara seperti itu cita-cita *founding fathers* dengan proklamasi kemerdekaan untuk menjadikan rakyat sebagai tuan dinegeri sendiri itu tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Dr. Riwanto Tirtosudarmo

Makalah Dr. Riwanto mengulas salah satu tantangan besar yang dihadapi negara-bangsa Indonesia berkaitan dengan ketidakmampuan negara atau pemerintah Indonesia dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi warganegaranya. Dalam tulisan ini tekanan akan diberikan pada latar belakang kegagalan negara dalam menciptakan lapangan kerja di dalam negeri – yang erat kaitannya dengan pilihan-pilihan strategi pembangunan yang dipilih selama ini – yang tidak ”pro poor” dan tidak mementingkan rakyat banyak.

Artinya, Indonesia sebagai bangsa dan negara meskipun tetap ada namun hanya sebagai negara pengirim tenaga kerja murah alias sebagai bangsa paria dalam konstelasi bangsa-bangsa di dunia yang semakin akan ditandai oleh globalisasi. Arah menjadi “bangsa kuli” tampaknya semakin nyata ketika ditengah ketidakmampuan negara menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, mengekspor tenaga kerja murah telah menjadi pilihan kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sekarang ini. Pada tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudoyono membentuk BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan lebih baik.

Ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja dan melindungi warganegaranya – yang merupakan tanggungjawab konstitusional negara – dalam jangka panjang akan menggerus “*nation*” Indonesia – karena akan semakin banyak warganegara yang keluar batas negara, dan diduga akan menjadi warga negara Indonesia dengan persepsi dan loyalitas yang berbeda terhadap “*nation*” Indonesia. Aliran manusia lintas batas negara (*cross-border migration*) ini memang merupakan salah satu sisi dari globalisasi, dimana kekuatan pasar merupakan arus utamanya.

Sisi lain dari globalisasi adalah arus modal (*capital*) yang sesungguhnya lebih memiliki pengaruh yang jauh lebih dahsyat dari arus manusia atau tenaga kerja. Jika pergerakan manusia bisa dilihat dengan mata telanjang, arus modal bergerak bebas tanpa terlihat – kecuali oleh para pialang valuta asing (*valas*) dan pengamat bursa di bursa-bursa efek (*stock exchange*). Jika mobilitas manusia selalu melewati pintu-pintu imigrasi yang ketat, arus kapital bergerak dengan leluasa melalui serat-serat optik yang tidak terdeteksi oleh petugas imigrasi. Dominasi kekuatan pasar dalam proses globalisasi adalah bagian dari kemenangan sistim ekonomi kapitalis-liberal, yang berhasil menjebol benteng-benteng pertahanan dan kedaulatan (*souvereign*) negara-bangsa, bersamaan dengan berakhirnya

perang dingin – yang secara menarik dicerminkan dengan fenomena runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989

Padahal pasal 33 dari UUD 1945, pada prinsipnya adalah demokrasi ekonomi, Hatta dalam hal ini sangat kuat dalam memformulasikan pasal itu. Sayangnya, meskipun sudah dilakukan amandemen atas UUD 1945 sampai saat ini masih menjadi *statement of intents*. Oleh karenanya dibutuhkan *reorganizing of power* baik dari aspek SDM maupun *resources* yang dimiliki Indonesia, yang dalam memformulasikan kekuatan-kekuatan yang ada sehingga tidak menjadi sekedar *statement of intents*.

Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA

Kebangsaan itu harus mengandung elemen kebangsaan. Kalau anda tidak bisa bangga sebagai orang Indonesia, saya kira anda bukan bangsa Indonesia yang baik. Ada 4 faktor yang bisa membuat bangsa itu bisa menjadi bangsa yang benar, yaitu bangsa yang bangga dengan kebangsaannya. Yang pertama mungkin karena saya adalah anggota AIPI, untuk itu saya jadikan yang pertama, yaitu prestasi-prestasi keilmuan, Kedua, akhirnya capaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu adalah faktor yang sangat mendukung terbangunnya rasa kebangsaan. Soal kesejahteraan tidak ada bangsa yang sejahtera di bawah kungkungan pemerintahan yang buruk. Apakah suatu masyarakat mau maju atau tidak, mau sejahtera atau tidak, mau cerdas atau tidak tergantung pada pemerintahan. Ekonomi, bisnis dan segala macam sangat tergantung pada suasana pemerintahan yang melingkupi interaksi ekonomi. Kenapa demikian, karena pemerintahan adalah inti dari kehidupan politik modern, dia yang mengontrol *resources*, dia membuat regulasi, dia mengontrol anggaran yang besar, APBN.

Ada enam sektor yang harus didahulukan berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, berkait dengan mempercepat perluasan lapangan kerja, berkait dengan kenyataan bahwa kemampuan masyarakat kita dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, hanya bisa terserap di enam sektor itu. (1) pertanian, (2) perkebunan, (3) perternakan, (4) kelautan, (5) pertukangan, dan (6) pariwisata. Enam sektor ini kalau kita genjot langsung akan maju, karena enam sektor tersebut bisa menyerap puluhan juta tenaga kerja dalam waktu singkat tanpa harus menunggu mereka di *training* dulu dan segala macam, bisa langsung dipakai dengan segala kekurangannya.

Adapun kebanggaan ketiga adalah kebanggaan itu pada kepemimpinan pemerintahan, kepemimpinan nasional, sedangkan faktor keempat adalah kebanggaan akan budaya bangsa. Budaya memberikan harga diri. Budaya yang membuat masyarakat, budaya yang membuat anda bangga pada situasi apapun. Kecintaan pada tanah air, kecintaan pada kampung halaman, itu yang membuat kita masih solid sebagai bangsa, bangga pada situasi apapun.

Sessi Ke Lima

Tema: Kepemimpinan dan Kebangsaan: Perspektif Perbandingan

Sessi ini memfokuskan pada aspek kepemimpinan dan kebangsaan dengan perspektif perbandingan negara lain. Negara yang dibahas dan dijadikan sebagai perspektif perbandingan adalah Malaysia Dan India, baik dari persepektif ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Pembicara dalam sessi ini adalah; Dr. Makmur Keliat dan Dr. Isbrodroni Suyanto, MA.

Dr. Makmur Keliat

”Rahasia” kemajuan India terletak pada kemampuan elite negeri itu untuk menghasilkan konsensus politik dalam mengatasi empat ketegangan yang biasanya muncul di negara berkembang. Sejauh yang penulis amati, elite India telah cukup berhasil mengelola ketegangan-ketegangan itu secara efektif.

Pertama, ketegangan yang muncul dari perjalanan historisnya khususnya terkait dengan masa kolonialisme dan kebutuhan untuk mendapatkan identitas sebagai bangsa. Secara konseptual terdapat dua pilihan yang tersedia bagi suatu negeri itu untuk melihat masa lalu setelah memperoleh kemerdekaannya. Pilihan pertama, dengan melahirkan gagasan kebangsaan sebagai anti-tesis terhadap kolonialisme. Dengan kata lain nasionalisme dikonsepsikan sebagai anak dari kolonialisme. Pilihan kedua, dengan menciptakan nasionalisme lahir sebelum masa kolonialisme. Pilihan yang diambil oleh kalangan elite India untuk mengatasi ketegangan historis ini adalah dengan mengambil pilihan yang kedua. Terdapat konsensus yang cukup luas di India bahwa nasionalisme di negeri itu mendahului kolonialisme. Konstruksi berpikir seperti ini dianggap penting oleh para elite India untuk menciptakan identitas kolektif bahwa sebagai suatu bangsa India telah hadir lebih dulu sebelum kolonialisme Barat datang ke negeri itu.

Kedua, ketegangan yang lahir dari kebutuhan pelembagaan politik dengan realitas kemajemukan penduduknya. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kini sekitar 1,1 milyar, dengan tingkat kemajemukan yang sangat beragam dari masyarakatnya, India sejak awal telah memilih pelembagaan politik melalui konsep negara demokratik dan sekuler. Penolakan terhadap sistem politik yang otoriter dan penolakan intervensi negara dalam isu agama yang telah diletakkan sejak awal kemerdekaan tampaknya didorong oleh dua pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah karena India merupakan suatu *multi-ethnic nation*. Karakteristik seperti ini telah mengakibatkan pilihan paling rasional bagi India adalah untuk memberikan ruang yang terbuka bagi setiap komunitas untuk berpartisipasi dalam politik.

Ketiga, ketegangan yang lahir dari interaksi antara negara dengan pasar. Sejauh yang dapat diamati, terdapat konsensus yang luas di India untuk tidak mengizinkan pasar mendikte negara. Sejak awal misalnya India telah memberikan peran negara yang sangat besar untuk mengembangkan industri-industri strategis seperti baja, kereta api, bioteknologi dan teknologi. Informasi yang dianggap penting untuk menumbuhkan ekonomi India di masa depan. Karena itu, tidak sepenuhnya benar pandangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi India yang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini karena kebijakan liberalisasi yang telah diluncurkan oleh Manmohan Singh pada 1991 ketika ia sebagai Menteri Keuangan pada masa kabinet Narashima Rao.

Konsensus untuk tidak membiarkan pasar mendikte negara juga sebagian bisa menjelaskan mengapa India memberikan prioritas yang sangat tinggi pada investasi sosial daripada investasi ekonomi. Perbedaan antara kedua jenis investasi terletak pada ekspektasi untuk pengembaliannya. Jika prioritas diberikan pada investasi ekonomi maka ekspektasi pengembaliannya cenderung untuk bersifat jangka pendek. Sebaliknya jika penekanannya pada investasi sosial, maka ekspektasinya terpola dalam kepedulian jangka panjang. Ketegangan di antara kedua kebutuhan ini dipecahkan oleh India dengan memberikan prioritas tertinggi pada investasi sosial. Hal ini misalnya terlihat dari intervensi negara yang sangat besar dalam memberikan dukungan bagi pendidikan tinggi dan juga pada sektor kesehatan.

Keempat, ketegangan yang muncul dari kebutuhan untuk mengembangkan *soft power* versus *hard power* ketika berinteraksi dengan dunia luar. India tampaknya telah mengambil posisi bahwa kedua hal itu sama pentingnya dan harus dikembangkan secara

bersamaan. Bagi India, *soft power* tanpa *hard power* adalah suatu ilusi dan tidak akan pernah menjadi efektif untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan India baik di tataran regional maupun internasional. Inilah yang menjelaskan mengapa sikap India terkesan paradoks di panggung internasional. Di satu sisi, India selalu mempromosikan dirinya sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, kampiun negara non-blok dan pemberi bantuan ekonomi bagi negara tetangganya. Namun di sisi lain bersikukuh untuk tidak menandatangani traktat NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*). Dan tetap mengembangkan dirinya sebagai aktor negara pemilik senjata nuklir dan terus membangun kekuatan militernya.

Sikap untuk menggabungkan *soft power* dan *hard power* ini sesungguhnya merefleksikan kuatnya pemikiran realist di kalangan pembuat kebijakan di India. Itu pula sebabnya terdapat ungkapan bahwa India tidak akan pernah pro atau berpihak kepada siapapun dalam beberapa isu rawan di tataran internasional kecuali “pro-India”. Kentalnya mentalitas “pro-India” ini juga yang bisa menjelaskan mengapa India memiliki perspektif yang sangat khas dalam berbagai isu baik pada proses kerjasama ekonomi regional dan internasional. Ringkasnya, mentalitas semacam itu dimaksudkan sebagai mekanisme untuk “mengIndiakan” seluruh proses kerjasama ekonomi tersebut.

Sedangkan di Indonesia, nasionalisme fokusnya bukanlah pada aspek kultural. Fokus nasionalismenya lebih pada pada peran pemimpin, dimana pemaknaannya hanya berhenti pada fungsi simbolik. Hal ini menjadi bahaya karena nasionalisme hanya dimaknai sebatas suatu proyek untuk menghidupkan sentimen kebangsaan. Akibatnya, Indonesia tidak pernah memiliki tradisi yang objektif untuk mendapatkan *immortal leader* seperti halnya yang dimiliki India dengan pengakuan negeri itu terhadap Nehru dan Gadhi. Oleh karenanya, ketika suatu pemerintahan berganti kita cenderung melihat pemimpin masa lalu sebagai pemimpin yang “tidak baik”.

Terkait dengan ketegangan kedua, Indonesia belum memiliki tradisi yang sangat kuat untuk menciptakan pelembagaan demokrasi untuk mengatasi kemajemukan masyarakatnya. Satu dasawarsa proses demokrasi yang telah dijalani belumlah cukup memadai untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi di kalangan pemimpin partai politik.

Dr. Isbodroini Suyanto, MA

Kepemimpinan Malaysia semenjak negara tersebut memperoleh kemerdekaannya, telah dikendalikan oleh para elit melalui kerjasama antar komunal, utamanya dalam partai Alliance atau partai Perikatan yang terdiri atas UMNO, MCA dan MIC. Setelah konflik rasial 13 Mei 1969, kerjasama tersebut diperluas dalam wadah Barisan Nasional yang dimulai pada tahun 1971. Kerjasama tersebut perlu dilakukan karena berbagai konflik politik yang pada umumnya bersumber dari hal-hal yang bersifat primordial, akan menghambat Malaysia ketika negara tersebut memacu pembangunannya, terutama di bawah kepemimpinan Mahathir.

Strategi politik terutama dirumuskan untuk mengentaskan kemiskinan bagi semua kelompok, terbentur pada komposisi kelompok yang tidak seimbang secara sosial dan ekonomis. Sangatlah tidak adil apabila para pemimpin Malaysia membiarkan ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan komposisi kelompok tersebut. Dalam hal ini mau tidak mau, meskipun melanggar prinsip demokrasi para pemimpin tersebut mengutamakan untuk memperbaiki kedudukan “*sons of the soil*”. Hal tersebut jelas tercermin dalam berbagai kebijakan politik seperti hak istimewa Melayu yang tak dapat diganggu gugat serta NEP (New Economic Policy) dan NDP (National Development Policy) yang masih terus berlaku, mencerminkan ketidakadilan. Meskipun NEP dan NDP ditujukan untuk

memperbaiki semua masyarakat tanpa melihat ras atau etnik, dalam kenyataannya tidaklah demikian.

Ketika Malaysia menentukan untuk menganut sistem kapitalis yang diuntungkan adalah para pebisnis Melayu karena mereka ditopang dan dilindungi oleh negara. Hal yang seperti itu telah menghadirkan kecemburuan pada kelompok non-Melayu yang sering berujung pada konflik antar etnik. Untuk menjaga stabilitas, berbagai konflik yang terjadi di atasi dengan alat yang ampuh yaitu ISA. Di samping ISA masih terdapat berbagai peraturan yang membelenggu kebebasan rakyat. Dari lima gaya kepemimpinan Malaysia tidak satupun yang tidak menggunakan cara-cara otoriter dengan gradasi yang berbeda-beda. Tetapi dari mereka semua, Mahathir yang kekuasaannya sangat hegemonik dan besar pula cara-cara otoriternya dalam menyelesaikan konflik-konflik politik. Tetapi bagaimanapun otoriternya Mahathir, ia telah berhasil menciptakan stabilitas yang menjadikan Malaysia sebagai salah satu “Macan Asia” karena pembangunannya yang dianggap berhasil dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat Malaysia

Sessi Enam

Tema: “Problematik Kebangsaan Era Demokratisasi dan Otonomi Daerah”

Pada sesi ini dibahas secara khusus problematik yang muncul akibat penerapan otonomi daerah, serta penguatan-penguatan yang dapat dilakukan termasuk di dalamnya potensi-potensi lokal yang dapat dikembangkan agar proses otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan baik pada pemerintah daerah itu sendiri maupun pemerintah pusat. Pembicara pada sesi ini adalah Drs. S.H. Sarundajang dan Drs. Ichsan Loulembah

Drs. S.H. Sarundajang

Dalam rangka membangun *nation state* dan dasar pijak nasionalisme Indonesia, satu bangsa adalah suatu solidaritas dan satu jiwa. Jadi bangsa ini sebenarnya tidak perlu satu agama, satu darah keturunan, satu suku. Sebab bangsa boleh bubar, suku tidak bisa bubar. Sayangnya, bangsa Indonesia termasuk bangsa yang terlambat mempelajari keunggulan suku-suku. Padahal setiap suku mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Kalau itu bisa diakomodir, sangat *power* untuk membangun bangsa ke depan.

Tuntutan otonomi daerah sebagai bagian dari proses reformasi di satu sisi memunculkan problematik. Beberapa problematik tersebut antara lain: adanya ketidakpuasan terhadap negara yang muncul dalam berbagai protes. Bahkan dengan adanya keleluasaan terhadap akses ekonomi, muncul fenomena etno nasionalisme karena kepentingan daerah yang terlalu luas ditambah euforia ekonomi sampai sekarang ini tidak bisa dibendung. Akibatnya, banyak rekrutmen dan promosi pejabat di daerah cenderung didominasi oleh persoalan golongan dan etnik. Akibat lebih jauh PNS tidak lagi medium pemersatu bangsa, karena terkotak-kotak dalam PNS lokal atau PNS etnis. Hal ini sangat berbahaya.

Drs. Ichsan Loulembah

Nasionalisme pada saat kemerdekaan hingga lima puluhan tahun kepemimpinan Sukarno dan Suharto, digunakan sebagai elemen utama penggerak pembangunan politik oleh Bung Karno dan ekonomi oleh Pak Harto. Niat kedua pemimpin itu sederhana, yaitu berupaya mengefektifkan serta mengefisienkan manajemen pembangunan pada dua level sekaligus. Tetapi sialnya, hal tersebut justru menegaskan aspek-aspek keberagaman serta aspek-aspek lokal. Tantangan kebangsaan mungkin saja yang belum matang serta keterpercahan ideologis yang tajam membuat pilihan sejarah Bung Karno meringkas pola

penyatuan politik secara keras pada hampir seujur sejarah orde lama. Pak Harto dengan sedikit berbeda juga tergoda untuk meringkus politik sebagai kelemahan semata, dengan mengedepankan ide-ide ekonomi yang harus tumbuh, menaruh politik di tempat yang amat belakang jika tidak disebut nista.

Manajemen penyatuan politik orde lama dan efisiensi pembangunan ekonomi orde baru punya watak sama yaitu sentralistik. Mudah difahami Indonesia terbangun dalam corak amat beragam. Wilayah yang luas terpisah oleh laut-laut yang dalam sulit untuk dikelola jika tidak melakukan sentralisasi di masa-masa pembentukan. Soalnya adalah, selain punya efek positif efisien dan efektif dalam manajemen pembangunan ekonomi, pilihan Bung Karno dan Pak Harto menghasikan potensi energi lokal, yang justru menjadi penyuplai utama nasionalisme di level bangsa pada masa awal sebelum merdeka.

Dari segi pembangunan politik dan ekonomi, nasionalisme yang berwajah desentralistik tidak membunuh keragaman, justru memanfaatkannya sebagai energi pembangunan. Dengan demikian segala rencana dan tindakan ekonomi politik serta secara nasional, mendapatkan topangan lokal yang kokoh. Medan yang begitu luas, beragam, dan tingkat kesulitan yang tidak sederhana, justru membutuhkan energi terserak untuk dipusatkan menjadi sebuah kekuatan. Menurut hemat saya dengan skenario itulah nasionalisme kita bisa kuat menghadapi tantangan dunia secara bersama

Sementara otoda (otonomi daerah) harus dilihat dalam semangat kesatuan dan kebangsaan, harus dilakukan dengan mengelola gerak memusat atau gerak sentripetal yang dulu begitu kuat ditangan orba dan orla, tidak sekedar berhadapan tetapi harus dikelola dengan baik, dengan gerak memencar atau gerak menyebar. Apa yang terjadi belakangan ini tidak bisa kita curigai sebagai kegagalan otoda. Otoda tidak harus dinilai dalam waktu yang singkat, sementara kegagalan sentralisasi kita lihat dalam waktu yang panjang.

Khusus untuk otoda, semangat dari beberapa elit dan partai besar, untuk mengembalikan jabatan gubernur sebagai posisi yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah pusat, patut ditentang. Gubernur sebaiknya tetap dipilih oleh rakyat, tetapi otoda dikembalikan atau dinaikkan levelnya ke provinsi untuk memudahkan manajemen pembangunan ekonomi politik dan juga meringankan beban Jakarta untuk berurusan tidak sekedar pada soal-soal dalam negeri.

Sessi Tujuh

Tema: Pemilu 2009, Keterwakilan Politik dan Konsolidasi Demokrasi.

Fokus dari pembahasan tema di atas diarahkan pada persoalan-persoalan perubahan sistem pemilu dalam kaitannya dengan keterwakilan politik dan konsolidasi demokrasi. Pembicara dalam sessi ini adalah: Drs. Tommi A. Legowo, MA, Dr. I Ketut Putra Erawan, Agus Riewanto, M.Si, serta Moch Nurhasim, S.IP, M.Si.

Drs. Tommi A. Legowo, MA

Pada saat ini ada dua perubahan penting yang ingin dicapai dalam paket Undang-Undang bidang politik; *Pertama*; adanya pemikiran yang komprehensif, yang mengkaitkan secara fungsional berbagai UU yang mengatur soal politik. Sasaran utama dari paket baru dari UU politik itu adalah membangun pemerintahan presidensil yang kuat, yang didukung oleh sistem multi partai sederhana. Dengan cara membebaskan pendirian parpol. Karena itu parpol bisa berjumlah sangat banyak, tidak dibatasi. Tetapi mempersempit pintu parpol untuk ke parlemen. Kontestasi parpol untuk kekuasaan dibatasi. Dalam UU pilpres hanya ada tiga atau lima ini yang akan menentukan bagaimana perpolitikan Indonesia selanjutnya diatur.

Kedua, pemerintah nasional maupun lokal itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ada partisipasi politik dari rakyat untuk menentukan pemimpin. Kemajuan yang lain perwakilan menjadi kuat. Melalui amandemen konstitusi sekarang ini kita melihat semua jabatan publik direkrut melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung.

Namun demikian, dari kemajuan tersebut muncul pula persoalan-persoalan baru yang lebih dikenal sebagai paradoks demokratisasi di Indonesia. *Pertama*, partisipasi politik saat ini sangat terbuka, semua orang terlibat dalam pemilihan, jenis pemilihan juga beragam, tetapi partisipan yang ikut itu juga sebaliknya berkurang. Ini dicerminkan dari meningkatnya secara pelan-pelan tapi pasti jumlah golput diberbagai pilkada. *Kedua*, pemerintahan yang merupakan hasil pilihan rakyat, banyak dinilai tidak bekerja untuk rakyat. Korupsi terjadi secara desentralistis. Parpol di caci maki sekarang ini, tapi makin banyak orang terdorong untuk mendirikan partai. Kemudian parlemen kuat, tapi juga menghasilkan banyak masalah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun ada pembaharuan dilakukan, ada kemajuan yang harus diapresiasi, pemilu 2009 akan cenderung belum beranjak dari pemilu prosedural ke pemilu substansial. Perwakilan masih berbasis kepada parpol besar pada tataran nasional, tapi pada tataran lokal itu akar konfliknya beragam. Di satu sisi, munculnya banyak partai dapat menjadi embrio yang kuat untuk partai lokal, namun di sisi lain dapat menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan fungsional.

Dr. I Ketut Putra Erawan

Ada empat cara untuk menilai apakah seorang wakil rakyat baik atau; *Pertama*, dia harus bisa memiliki legitimasi dan otoritas. *Kedua*, dia harus bisa merepresentasikan dari mana dia berasal. *Ketiga*, simbolik. Dia mengerti aturan kultural dan prasyarat yang ada di masyarakat itu, dan *Keempat*, substantif. Dia tahu keinginan rakyat yang berubah, yang selalu menuntut sesuatu.

Sedangkan empat faktor yang berpengaruh apakah wakil rakyat kita bisa melaksanakan fungsinya atau tidak dalam pemilu 2009, dilihat dari indikator: Apakah sistem kepartaian kita dirancang untuk menghasilkan multi partai yang sederhana. Dengan demikian, persyaratan untuk ikut pemilu dengan standar rendah akan menghasilkan representasi legitimasi formal yang rendah pula. Yang kedua, konsistensi sistem pemilihan' Semakin tinggi konsistensi system pemilihan yang diterapkan, semakin tinggi pula kapabilitas wakil rakyat dapat menjalankan fungsinya. *Ketiga*, adalah kuatnya kapasitas komunikasi politik; Keempat, adanya kapasitas penyelenggara pemilu yang tinggi. Sayangnya keempat faktor tersebut pada saat ini masih rendah.

Agus Riewanto, M.Si

Ada kemajuan yang luar biasa yang terkait dengan pemilu yang mengatur tentang perempuan. Misalnya pemilu 2004, diterapkan aturan bahwa proses pencalonan itu perlu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Lalu dalam pemilu 2009 dengan UU No. 10 tahun 2008 itu lebih maju lagi. Dimana parpol yang akan mengajukan calonnya, minimal 30 persen merupakan keterwakilan perempuan. Dalam UU ini juga diatur proses pencalonan calon perempuan itu dilakukan dengan cara *ziper*. Jadi jika ada *zig zag*, dalam tiga calon mesti ada satu calon perempuan. Walaupun sebenarnya pengaturan itu cukup seksi bagi perempuan, tapi sebetulnya banci. Karena peraturan ini tidak cukup akomodatif ketika dipraktikkan di lapangan.

Selain itu, kalau partai politik tidak mampu mencalonkan perempuan lebih dari 30 persen juga tidak ada sanksi yang tegas. Partai hanya cukup memberikan keterangan tertulis kepada KPU, lalu KPU mengumumkan kepada publik. Jadi tidak ada sanksi

misalnya kalau 30 persen tidak mampu dipenuhi oleh parpol, parpol bisa digugurkan dalam pencalonan. Tidak ada seperti itu. Begitu juga dalam proses *ziper*. Jadi dalam tiga calon itu ada satu calon perempuan, itu tidak mudah diaplikasikan di lapangan. Banyak tafsir diantara aktifis partai politik.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan pemilu 2004 dan 2009 itu tidak jauh berbeda. Model penempatan kandidat itu lebih banyak di prioritaskan oleh para elit politik. Jadi kalau disebut dengan calon perempuan itu biasanya adalah istrinya pimpinan parpol, istrinya sekretaris parpol, atau istrinya bendahara parpol. Makanya yang unik lagi sekarang beberapa calon perempuan itu bukan kader inti, tapi diambil dari beberapa istri pejabat. Jadi tidak terkait dengan soal kualitas perempuan.

Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si

Pada pemilu 2009, partai akan tetap dominan di dalam proses menentukan rekrutmen dan penentuan calon yang akan mempengaruhi watak perwakilan politik kita ke depan. Beberapa strategi dilakukan partai politik untuk mengukuhkan dominasinya. Misalnya daftar lis terbuka, supaya tidak terbuka ya dibuat berbagai macam aturan. Yang ke dua calon memilih tidak diarahkan pada daftar nama orang, melainkan kepada tanda gambar. Ketiga, adanya potensi suara hilang yang cukup besar, ketika ambang batas 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional itu digunakan di dalam konteks untuk penentuan kursi di DPR. Kemudian tidak diakuinya mekanisme suara pada internal partai sebagai penentuan calon terpilih 30 persen berdasarkan pada nomor urut. Sebagian besar lalu partai politik berkompromi membuat semacam kontrak dengan anggota-anggota yang dicalonkan bahwa nanti akan digunakan mekanisme terbanyak. Konsekuensi dari model politik sebagaimana disebutkan di atas adalah rendahnya keterwakilan politik yang dihasilkan.

Kesimpulan

Secara umum peserta seminar berpendapat bahwa perjalanan politik di Indonesia masih berjalan dalam proses transisional yang tergesa-gesa dan terkesan rancu, tetapi sekaligus penuh harapan. Di satu pihak ada harapan-harapan terhadap proses demokrasi, tapi di lain pihak praktek politik masih dijalankan dengan cara-cara konvensional dan manipulatif.

Meskipun prosedur demokrasi telah dijalankan, antara lain telah dikukukannya pemilihan secara langsung para pemimpin negara oleh rakyat, mulai dari presiden sampai bupati, para pembicara peserta seminar melihat bahwa secara substantif demokrasi masih belum tercapai. Demokrasi prosedural bahkan dinilai membawa proses politik menjadi permainan partai-partai yang cenderung menjadi oligarkis dan menguatnya “*money politics*”. Dalam perkembangan politik yang demikian, ada kecenderungan aktifitas politik semata-mata dilihat sebagai kegiatan untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan belaka. Politik sebagai sebuah kebajikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak sebagaimana pernah diperlihatkan oleh para *founding father* bangsa telah ditinggalkan oleh sebagian besar politisi kita. Berbagai skandal korupsi dalam jumlah yang besar yang melibatkan anggota parlemen maupun para pejabat negara baik di pusat maupun di daerah merupakan indikator kuat dari mewabahnya dekadensi moral politik para politisi pasca Suharto.

Dalam situasi politik yang belum mencerminkan apa yang diperjuangkan para reformis sebelum jatuhnya Suharto ini, birokrasi pemerintah sebagai mesin penggerak untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dicanangkan oleh berbagai departemen juga

menderita amnesia dan masih mengidap dalam dirinya orientasi untuk melayani kepentingannya sendiri dan masih jauh dari orientasi untuk melayani publik.

Proses dan prosesi pilkada, pemilu, dan pilpres masih berjalan ambigu dan bias pada kepentingan partisan, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok (parpol), sehingga sulit untuk lahir dan terbentuk sosok pemimpin yang berjiwa negarawan dan berkarakter kebangsaan, yang mampu berdiri di atas semua golongan. Oleh karena itu, etika politik perlu dikedepankan dengan melalui kedewasaan dan sportifitas politik diantara para kandidat yang bertarung. Dengan demikian, perlu dikembangkan praktek berdemokrasi yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa memiliki jiwa kenegarawanan, kredibel, dan visioner bagi kepentingan-kepentingan besar bangsa. Hal itu bisa terwujud apabila pemilihan pimpinan atau pemimpin dijadikan momentum yang tepat untuk memilih pemimpin yang terbaik yang mampu mengembag amanat penderitaan rakyat. Pemimpin yang mampu menahkodai negara Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

Pertentangan di tingkat elit, tidak boleh diturunkan kepada *grass root* yang mendorong distegrasi bangsa. Yang harus dilakukan justru mengembangkan pluralisme, dengan demikian pertentangan elit, perbedaan pendapat adalah sebuah kekayaan sehingga akan melahirkan satu pemerintahan yang kuat yang bisa menciptakan kesejahteraan.

Rekomendasi

1. Hanya pemimpin berintegritas yang akan mampu mentransformasi sistem demokrasi yang saat ini bersifat transaksi menjadi substansi. Untuk mendapatkan kepemimpinan nasional yang ideal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi; *Pertama*, melakukan seleksi kompetitif partai, antar partai dan di luar partai bahkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi serta iklan di media massa dan memperkuat kontrol sosial masyarakat (*civil society*) terhadap kepemimpinan yang akan muncul. Hal ini dapat dicapai dengan membangun pers yang kuat, sebagai *the fourth estate*, adalah salah satu cara lain untuk mewujudkannya; *Kedua*, menyeimbangkan kekuatan kekuatan politik yang ada agar dapat melakukan mekanisme oposisi yang sehat sehingga dengan kultur akuntabilitas yang kuat dapat menekan siapapun yang terpilih sebagai pemimpin bertanggungjawab pada publik.
2. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin: *Pertama*, adanya *leadership*, *Kedua* mampu mengembangkan *efektifnes*, dalam satu proses pembuatan kebijakan (*decision making*), *Ketiga* memiliki kecakapan manajerial dan masalah kenegaraan.
3. Terdapat tiga kewajiban yang harus selalu dilaksanakan oleh setiap penguasa. *Ketiga* kewajiban tersebut adalah; *Pertama*, melakukan proteksi terhadap negara dari serangan eksternal; *Kedua*, melakukan pemiliharaan hukum dan ketertiban di dalam negara; *Ketiga*, memberikan perlindungan kesejahteraan rakyat. Adapun langkah-lamngkah strategis dan taktis yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin dalam kehidupan politik. Di satu sisi, segalanya harus tampak beradab, layak dalam pandangan umum (*decent*), demokratis dan *fair*. Namun, di sisi lain, harus dapat bermain dalam aturan yang ketat.
4. Proses “reformasi” harus lebih ditekankan pada upaya membangun kapasitas negara (*state capacity*). Untuk itu, maka fokus reformasi seyogianya harus lebih ditekankan pada upaya membangun dan memperkuat empat pilar utama dari *state capacity* meliputi: Kapasitas Institusional (*Institutional Capacity*); Kapasitas Teknis (*Technical Capacity*); Kapasitas Administratif (*Administrative Capacity*);

dan Kapasitas Politik (*Political Capacity*). Upaya membangun kapasitas negara ini, tentunya, juga harus disertai dengan upaya membangun kapasitas masyarakat *civil* (*societal capacity*).

5. Dari segi pembangunan politik dan ekonomi, nasionalisme yang berwajah desentralistik tidak membunuh keragaman, justru memanfaatkannya sebagai energi pembangunan. Dengan demikian segala rencana dan tindakan ekonomi politik serta secara nasional, mendapatkan topangan lokal yang kokoh. Medan yang begitu luas, beragam, dan tingkat kesulitan yang tidak sederhana, justru membutuhkan energi terserak untuk dipusatkan menjadi sebuah kekuatan. Dengan skenario itulah nasionalisme kita bisa kuat menghadapi tantangan dunia secara bersama.
6. Khusus untuk otoda, semangat dari beberapa elit dan partai besar, untuk mengembalikan jabatan gubernur sebagai posisi yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah pusat, patut ditentang. Gubernur sebaiknya tetap dipilih oleh rakyat, tetapi otoda dikembalikan atau dinaikkan levelnya ke provinsi untuk memudahkan manajemen pembangunan ekonomi politik dan juga meringankan beban Jakarta untuk berurusan tidak sekedar pada soal-soal dalam negeri.